

URGENSI REFORMASI HUKUM MILITER DALAM MENJAMIN KEADILAN BAGI PRAJURIT DAN MASYARAKAT SIPIL

Irwan Triadi, Nisa Resya Hamdani, Silvi Aryana Paradita, Chintya Rachma Hudaya, Najwa Aulia Rahman

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email : irwantriadi1@yahoo.com, 2310611076@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611072@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611070@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611078@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Memastikan keadilan yang setara bagi setiap warga negara, baik prajurit maupun masyarakat sipil, adalah bagian penting dalam hukum di negara demokrasi. Judul "Urgensi Reformasi Hukum Militer dalam Menjamin Keadilan Bagi Prajurit dan Masyarakat Sipil" menyoroti tantangan dalam sistem hukum militer di Indonesia yang sering menimbulkan pertanyaan tentang kemampuannya dalam menegakkan keadilan yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi reformasi hukum militer di Indonesia, bagaimana perubahan sistem dapat meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat sipil yang menjadi korban pelanggaran oleh militer, dan memastikan penegakan disiplin yang adil di dalam militer. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi pustaka. Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna atau perspektif subjek pada penelitian kualitatif lebih ditonjolkan, dibandingkan pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum militer sangat mendesak. Tumpang tindih yurisdiksi antara peradilan militer dan umum adalah hambatan bagi akses keadilan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses internal militer perlu ditingkatkan. Edukasi hukum dan HAM bagi prajurit juga penting untuk membangun budaya disiplin yang adil.

Kata Kunci : Reformasi Hukum Militer, Keadilan, Prajurit, Masyarakat Sipil

Abstract

Ensuring equal justice for every citizen, both soldiers and civilians, is an important part of law in a democratic country. The title "The Urgency of Military Law Reform in Ensuring Justice for Soldiers and Civilians" highlights the challenges in the military legal system in Indonesia that often raises questions about its ability to uphold fair justice. This study aims to analyze the urgency of military law reform in Indonesia, how changes to the system can improve access to justice for civilians who are victims of violations by the military, and ensure fair discipline enforcement within the military. The research method used is qualitative with a literature study. Qualitative research methods are descriptive research that tends to

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 420

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

use analysis. The process and meaning or perspective of the subject in qualitative research are more emphasized, compared to quantitative research. Qualitative research aims to explain a phenomenon as deeply as possible by collecting data as deeply as possible. The results of the study indicate that military law reform is urgent. Overlapping jurisdiction between military and general courts is an obstacle to access to justice. In addition, transparency and accountability in internal military processes need to be improved. Legal and human rights education for soldiers is also important to build a culture of fair discipline.

Keywords: *Military Law Reform, Justice, Soldiers, Civil Society*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemberlakuan hukum yang adil dan merata merupakan pilar fundamental dalam konstruksi sebuah negara demokrasi yang kuat, sebuah prinsip yang seyogianya juga terinternalisasi dalam institusi militer. Di Indonesia, sistem hukum militer memegang peranan vital dengan sejarah panjang yang telah melalui berbagai evolusi, menyesuaikan diri dengan dinamika politik dan sosial yang terus bergerak.

Meskipun demikian, hingga saat ini, urgensi reformasi hukum militer tetap menjadi diskursus krusial yang menuntut atensi serius dari berbagai pihak. Esensi dari reformasi ini bukan hanya berpusat pada upaya untuk memastikan keadilan bagi prajurit, melainkan juga untuk menegakkan dan melindungi hak-hak fundamental masyarakat sipil yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan lembaga pertahanan negara. Harapannya, reformasi ini dapat menjadi fondasi kokoh bagi terciptanya sistem peradilan militer yang lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal.

Sistem peradilan militer yang saat ini berlaku di Indonesia, dengan akar historisnya yang terentang hingga masa kolonial, seringkali memicu perdebatan mengenai independensinya serta efektivitasnya dalam menegakkan keadilan secara imparial. Berbagai catatan kasus di masa lalu menunjukkan adanya celah hukum yang berpotensi memfasilitasi impunitas atau menciptakan disparitas keadilan, khususnya dalam insiden yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia oleh oknum militer terhadap warga sipil.¹

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu :

- a. Bagaimana Urgensi Reformasi Hukum Militer Dapat Meningkatkan Hak-Hak Dan Proses Peradilan Yang Adil Bagi Setiap Prajurit ?
- b. Bagaimana Perubahan Mendesak Yang Perlu Dilakukan Agar Disiplin Militer Ditegakkan Secara Adil Tanpa Mengabaikan Hak Prajurit ?
- c. Bagaimana Urgensi Reformasi Hukum Militer Dapat Memastikan Perlindungan Hukum Yang Adil Bagi Masyarakat Sipil ?
- d. Bagaimana Perubahan Yang Paling Mendesak Dalam Sistem Peradilan Militer Untuk Meningkatkan Akses Keadilan Dan Transparansi Bagi Masyarakat Sipil ?

¹ Chairul, A. Hukum Disiplin Militer dan Hak Prajurit. Jakarta: Sinar Grafika. 2023. Hlm 75

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna atau perspektif subjek pada penelitian kualitatif lebih ditonjolkan, dibandingkan pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya.

Pada penelitian kualitatif, peneliti lebih menekankan pada kedalaman data yang didapatkan. Semakin dalam serta semakin detail yang diperoleh, maka semakin baik pula kualitas dari penelitian kualitatif, Peneliti juga menggunakan berbagai buku, jurnal, dan publikasi pustaka lain yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menunjang penelitian terselesaikan.

C. PEMBAHASAN

1. Urgensi Reformasi Hukum Militer Dapat Meningkatkan Hak-Hak Dan Proses Peradilan Yang Adil Bagi Setiap Prajurit

Pemberlakuan hukum yang adil dan merata sangat penting untuk membangun negara demokrasi yang kuat, termasuk dalam institusi militer. Di Indonesia, sistem hukum militer memiliki sejarah panjang dan terus mengalami adaptasi mengikuti perubahan politik dan sosial. Namun, reformasi hukum militer masih perlu perhatian serius untuk menjamin keadilan bagi prajurit dan melindungi hak-hak masyarakat sipil yang terlibat dengan lembaga pertahanan. Tujuan reformasi adalah menciptakan sistem peradilan militer yang lebih transparan, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal.²

Sistem peradilan militer saat ini, yang berasal dari masa kolonial, masih menimbulkan pertanyaan tentang independensinya dan kemampuannya menegakkan keadilan. Beberapa kasus menunjukkan celah hukum yang memungkinkan pelanggaran, terutama oleh militer terhadap warga sipil, yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi militer. Oleh karena itu, penting untuk meninjau dan memperbaiki regulasi yang ada.

Reformasi hukum militer perlu mencakup peninjauan yurisdiksi peradilan militer, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan prajurit di luar tugas militer. Mengalihkan beberapa kasus ke peradilan umum dapat membantu mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum.

Selain itu, tata kelola dan mekanisme pengawasan internal dalam militer harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Reformasi ini akan meningkatkan profesionalisme prajurit dan memperkuat hubungan antara militer dan masyarakat sipil, serta meningkatkan kepercayaan publik.

2. Perubahan Mendesak Yang Perlu Dilakukan Agar Disiplin Militer Ditegakkan Secara Adil Tanpa Mengabaikan Hak Prajurit

Disiplin militer adalah fondasi esensial bagi efektivitas dan profesionalisme setiap angkatan bersenjata di dunia. Keberadaan disiplin yang teguh memungkinkan terwujudnya rantai komando yang jelas, koordinasi yang efektif, dan kemampuan respons yang cepat dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara.

Tanpa disiplin, sebuah institusi militer akan kehilangan arah dan kekuatan intinya. Namun, penegakan disiplin ini tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Justru sebaliknya, disiplin yang sejati harus berakar pada keadilan substantif, di mana setiap prajurit merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil dan

² Eva, R. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Peradilan Militer. *Jurnal Perlindungan Saksi*, 3(2). 2021. Hlm 35

transparan dalam setiap proses penegakan aturan.³

Sejarah penegakan disiplin di lingkungan militer, baik di Indonesia maupun di banyak negara lain, seringkali menyisakan catatan yang kompleks. Ada kalanya, upaya penegakan disiplin yang terlalu kaku atau kurang transparan justru berujung pada pelanggaran hak-hak prajurit, yang pada akhirnya dapat merusak moral, semangat korps, dan bahkan profesionalisme. Kasus-kasus yang menimbulkan persepsi ketidakadilan atau impunitas di kalangan prajurit dapat mengikis kepercayaan mereka terhadap sistem dan atasan mereka sendiri.

Dalam konteks modern, bukanlah sekadar kepatuhan buta terhadap perintah, melainkan sebuah komitmen yang lahir dari kesadaran dan pemahaman akan pentingnya aturan, yang dibangun di atas fondasi rasa keadilan dan penghargaan terhadap martabat setiap individu yang mengemban tugas negara.

Dengan demikian, penegakan disiplin tidak lagi menjadi beban, melainkan instrumen untuk membentuk prajurit yang lebih profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sekaligus memperkuat fondasi pertahanan negara yang kokoh dan disegani.

3. Urgensi Reformasi Hukum Militer Dapat Memastikan Perlindungan Hukum Yang Adil Bagi Masyarakat Sipil

Perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat sipil dalam interaksi dengan institusi militer adalah penting dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum. Di Indonesia, hubungan antara militer dan masyarakat sipil telah mengalami banyak fase, dengan sistem hukum militer yang menjadi pengatur utama.

Sejarah sistem peradilan militer di Indonesia, yang berasal dari masa kolonial dan diperkuat setelah kemerdekaan, sering kali membuat militer berada dalam posisi otonomi hukum. Hal ini bisa menciptakan persepsi atau kenyataan impunitas untuk anggota militer yang melanggar hukum terhadap warga sipil. Ketidakseimbangan ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap militer dan melanggar prinsip kesetaraan di muka hukum.

Masalah yang sering diangkat adalah yurisdiksi peradilan militer. Banyak kasus kriminal yang melibatkan prajurit, meskipun terjadi di luar tugas kemiliteran dan melibatkan masyarakat sipil, tetap diadili di pengadilan militer. Situasi ini mempersulit masyarakat sipil untuk mendapatkan keadilan yang transparan dan setara dibandingkan jika kasus tersebut diadili di pengadilan umum. Perbedaan prosedur dan potensi bias dalam peradilan militer menjadi penghalang bagi korban sipil.

Diantara nya kurangnya pengawasan eksternal yang efektif dan independen terhadap militer juga menjadi masalah. Transparansi dalam investigasi dan peradilan militer belum terwujud sepenuhnya, sehingga menyulitkan masyarakat sipil untuk memantau proses hukum yang adil. Reformasi hukum militer harus mengatasi masalah yang mendukung impunitas dan ketidakadilan. Perubahan harus mendasar, bukan sekadar kosmetik.⁴

Dalam reformasi perlu menggeser yurisdiksi kasus pidana yang melibatkan militer dan masyarakat sipil ke pengadilan umum. Ini penting untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi korban sipil dalam proses hukum. Selain itu, mekanisme pelaporan dan investigasi militer perlu diperkuat agar lebih independen dan profesional.

Masyarakat sipil harus dijamin bahwa laporan mereka akan diproses secara serius.

³ Iqbal, M. Peran Lembaga Non-Pemerintah dalam Mendorong Reformasi Militer. *Jurnal Hubungan Internasional*, 20(1). 2024. Hlm 95

⁴ Vega, M. Membangun Kepercayaan Publik melalui Reformasi Militer. *Jurnal Demokrasi dan Keadilan*, 7(2). 2024. Hlm 46

Peningkatan transparansi dalam proses hukum dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat sipil juga diperlukan. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia untuk prajurit harus diintegrasikan dalam reformasi, agar mereka lebih memahami tugas mereka dan menghormati hak-hak sipil.

4. Perubahan Yang Paling Mendesak Dalam Sistem Peradilan Militer Untuk Meningkatkan Akses Keadilan Dan Transparansi Bagi Masyarakat Sipil

Sistem peradilan yang adil dan transparan merupakan inti dari sebuah negara hukum yang berfungsi optimal. Dalam konteks Indonesia, di mana institusi militer memegang peran strategis dalam pertahanan negara, sistem peradilan yang menaungi mereka menjadi sorotan penting, terutama terkait dengan interaksinya dengan masyarakat sipil.

Historis sistem peradilan militer di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari warisan kolonial dan kebutuhan konsolidasi kekuatan pasca-kemerdekaan. Desain sistem ini seringkali memberikan otonomi yang signifikan kepada militer dalam mengadili anggotanya sendiri, bahkan untuk pelanggaran yang melibatkan warga sipil.⁵

Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk menghadirkan bukti, saksi, atau mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, sehingga mengurangi potensi tercapainya keadilan substantif. Ketiadaan transparansi dan akuntabilitas yang memadai dalam proses peradilan militer juga menjadi penghalang besar bagi akses keadilan masyarakat sipil.

Perlu disadari bahwa reformasi ini merupakan bagian integral dari upaya yang lebih besar untuk membangun supremasi hukum di Indonesia. Dualisme peradilan yang tidak proporsional atau mekanisme yang kurang transparan dapat menjadi celah bagi penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh oknum maupun sistem itu sendiri. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem peradilan militer tidak hanya akan menguntungkan masyarakat sipil, tetapi juga secara tidak langsung akan meningkatkan citra dan integritas institusi militer itu sendiri.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Urgensi reformasi hukum militer di Indonesia adalah kebutuhan mendesak untuk mencapai keadilan bagi prajurit dan masyarakat sipil. Sistem hukum militer yang ada saat ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam yurisdiksi dan transparansi, yang menghalangi akses keadilan bagi masyarakat sipil. Hal ini dapat mengikis kepercayaan publik dan meningkatkan impunitas, merusak kredibilitas institusi militer.

Reformasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia dan supremasi hukum dalam militer. Peninjauan yurisdiksi, akuntabilitas internal, dan keterbukaan proses peradilan militer sangat penting. Masyarakat sipil harus merasa aman agar hukum diterapkan secara adil untuk membangun negara hukum yang demokratis.

Reformasi memastikan penegakan disiplin dalam militer yang adil dan proporsional, serta tidak mengabaikan hak prajurit. Kualitas investigasi yang baik dan mekanisme pengaduan yang independen adalah penting untuk menjaga moral dan profesionalisme prajurit. Disiplin harus berasal dari kesadaran dan keadilan agar membentuk prajurit yang berintegritas dan bertanggung jawab.

⁵ Qolbi, S. Dilema Peradilan Militer: Antara Disiplin dan Keadilan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2023. Hlm 20

2. Saran

- a. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu memprioritaskan revisi undang-undang peradilan militer dengan menekankan kesetaraan di hadapan hukum. Langkah mendesak memindahkan yurisdiksi kasus pidana umum yang melibatkan militer dan masyarakat sipil ke peradilan umum, serta memperkuat peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga pengawas sipil lainnya. Selain itu, investasi dalam pendidikan hukum dan hak asasi manusia bagi militer harus ditingkatkan.
- b. Mekanisme transparan dan independen untuk menanggapi pengaduan masyarakat sipil dan prajurit mengenai pelanggaran hukum di lingkungan militer perlu dibentuk. Ini termasuk sistem pelaporan aman dari ancaman balasan dan tim investigasi gabungan untuk kasus sensitif. Dengan demikian, akuntabilitas militer akan kuat, keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap TNI dapat terjaga dan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairul, A. (2023). *Hukum Disiplin Militer dan Hak Prajurit*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eva, R. (2021). *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Peradilan Militer*. *Jurnal Perlindungan Saksi*, 3(2)
- Iqbal, M. (2024). *Peran Lembaga Non-Pemerintah dalam Mendorong Reformasi Militer*. *Jurnal Hubungan Internasional*, 20(1)
- Vega, M. (2024). *Membangun Kepercayaan Publik melalui Reformasi Militer*. *Jurnal Demokrasi dan Keadilan*, 7(2)
- Qolbi, S. (2023). *Dilema Peradilan Militer: Antara Disiplin dan Keadilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.